

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank adalah suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai *financial intermediary*, atau perantara antara kedua pihak yaitu menghimpun dana dari pihak yang berlebihan dana dan menyalurkannya kepada pihak yang membutuhkan atau kekurangan dana.

Bank menurut Undang-undang No.10 tahun 1998 pasal 1 ayat 2 merupakan “badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”. Menurut pasal 1 ayat 3, bank umum adalah “bank yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran”¹

Bank Islam atau bisa disebut bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam.² Dengan kata lain, dalam menjalankan usahanya bank syariah menggunakan pola bagi hasil (*profit loss sharing*) yang merupakan landasan utama dalam segala operasinya, baik dalam produk pendanaan,

¹Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

²Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah*, (cet II: Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2011) hlm 15.

pembiayaan maupun dalam produk lainnya dan menghindari unsur bunga di dalamnya.³

Perbankan syariah di Indonesia sedang mengalami perkembangan, seperti diketahui, bank syariah pertama di Indonesia merupakan hasil kerja tim perbankan MUI, yaitu dengan dibentuknya PT. Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang akta pendiriannya ditandatangani pada tanggal 1 November 1991.⁴ Perkembangan industri perbankan syariah memiliki pertumbuhan yang cukup signifikan dengan ditandai oleh penambahan jumlah kantor perbankan syariah. Menurut data statistik perbankan syariah bulan Juni 2014 yang diunggah dari Bank Indonesia, terdapat 11 buah Bank Umum Syariah (BUS), 23 Unit Usaha Syariah (UUS), dan 163 Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS). Jumlah perbankan syariah tersebut berbeda dengan tahun 2009, yakni hanya terdapat 6 buah Bank Umum Syariah (BUS), 25 Unit Usaha Syariah (UUS), dan 138 Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS).⁵

Pada dasarnya bank Islam sama seperti bank umum lainnya, yaitu menerima dana dalam bentuk deposito atau tabungan dan kemudian menginvestasikan dana tersebut dalam bentuk pinjaman atau investasi lainnya. Perbedaannya adalah bank Islam beroperasi tidak atas dasar bunga tetapi atas dasar pembagian (*sharing*) keuntungan.⁶ Dalam bank syariah, akad yang dilakukan memiliki konsekuensi duniawi dan ukhrawi karena akad yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. Seringkali nasabah berani melanggar

³Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm 11.

⁴Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm 167.

⁵Bank Indonesia. Statistik Perbankan Syariah, Juni 2014, (Jakarta: Bank Indonesia, 2014).
www.bi.go.id

⁶Mamduh M. Hanafi, *Manajemen Keuangan*, (cet I: Yogyakarta: BPFE-YOGYAKARTA, 2004), hlm 501.

kesepakatan/ perjanjian yang telah dilakukan bila hukum itu hanya berdasarkan hukum positif belaka, tapi tidak demikian bila perjanjian tersebut memiliki pertanggungjawaban hingga *yaumul qiyamah* nanti.⁷

Perbedaan selanjutnya antara bank konvensional dengan bank syariah terdapat pada lembaga penyelesaian sengketa, jika pada perbankan syariah terdapat perbedaan atau perselisihan antara bank dan nasabahnya, kedua belah pihak tidak menyelesaikannya di pengadilan negeri, tetapi menyelesaikannya sesuai tata cara dan hukum materi syariah.⁸ Lembaga yang mengatur hukum materi dan atau berdasarkan prinsip syariah di Indonesia dikenal dengan nama Badan Arbitrase Syariah Nasional atau BASYARNAS yang didirikan secara bersama oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Majelis Ulama Indonesia.⁹

Perbedaan juga terdapat pada struktur organisasi dimana pada bank syariah terdapat keharusan adanya Dewan Pengawas Syariah yang bertugas mengawasi operasional bank dan produk-produknya agar sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah. Dewan Pengawas Syariah biasanya diletakkan pada posisi setingkat Dewan Komisaris pada setiap bank. Hal ini untuk menjamin efektivitas dari setiap opini yang diberikan oleh Dewan Pengawas Syariah. Karena itu, biasanya penetapan anggota Dewan Pengawas Syariah dilakukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, setelah para anggota Dewan Pengawas Syariah itu mendapat rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional.¹⁰

⁷Afzalur Rahman, *Economic Doctrines of Islam* (Labore: Islamic Publication, 1990).

⁸Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik* (cet I :Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm 30.

⁹Lihat buku, *Arbitrase Islam di Indonesia* (1994) karya penulis bersama rekan-rekan editorial lainnya.

¹⁰Muhammad Syafii Antonio, *op.cit.*, hlm 31.

Dalam bank syariah, bisnis dan usaha yang dilaksanakan tidak terlepas dari saringan syariah. Karena itu, bank syariah tidak akan mungkin membiayai usaha yang terkandung didalamnya hal-hal yang diharamkan.¹¹ Secara garis besar, pengembangan produk bank syariah dikelompokkan menjadi tiga kelompok, yaitu produk penyaluran dana (*financing*), produk penghimpunan dana (*funding*), dan produk jasa (*service*).¹² Produk bank syariah mempunyai kemiripan namun tidak sama dengan bank konvensional, karena pada bank syariah terdapat pelarangan adanya unsur riba, *gharar*, dan *maisyrir*.

Produk penghimpunan dana atau DPK pada bank syariah menggunakan akad *murabahah*, *wadiah* dan *musyarakah*. Hal ini merupakan salah satu tugas dan fungsi bank syariah yaitu menghimpun dana (*funding*) dari masyarakat dan kemudian menyalurkannya (*financing*) kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dana.

Selain menyediakan produk penghimpunan dana, bank juga memiliki produk pembiayaan. Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam - meminjam antar bank dan atau lembaga keuangan lainnya dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu.¹³ Pembiayaan merupakan salah satu tugas dan fungsi bank syariah dengan menyalurkannya kepada masyarakat sebagai upaya meningkatkan perekonomian masyarakat.

¹¹Muhammad Syafii Antonio, *Prinsip dan Etika Bisnis dalam Islam*, paper dipresentasikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sumatera Utara, 1994.

¹²Muhammad, *op.cit.*, hlm 90.

¹³Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking; Sistem Bank Islam Bukan Hanya Solusi Menghadapi Krisis, Namun Solusi dalam Menghadapi Berbagai Persoalan Perbankan & Ekonomi Global* (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hlm 698.

Salah satu produk pembiayaan yang disediakan di BPR Syariah adalah pembiayaan *musyarakah*, *musyarakah* berasal dari kata *syarika* yang berarti persekutuan.¹⁴ Secara etimologi *as-syirkah* atau *al-musyarakah* mengandung makna yang sama *mukhalatatu as-syarikaini* (bercampur atau bergabungnya dua orang) untuk melakukan kerja sama.¹⁵

Pembiayaan *musyarakah* adalah pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.¹⁶

Dengan demikian pembiayaan *musyarakah* dapat diartikan sebagai suatu akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak yang bekerjasama memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko ditanggung bersama-sama sesuai dengan kesepakatan.

Selain itu, produk pembiayaan yang ada di bank Syariah adalah Pembiayaan multijasa dengan menggunakan akad *ijarah*. Pembiayaan multijasa ini merupakan pembiayaan konsumtif yang diberikan oleh pihak BPR Syariah terhadap nasabah untuk memperoleh jasa atau manfaat yang sesuai dengan syariat Islam seperti jasa kesehatan, jasa pendidikan dan sebagainya.

¹⁴Abdul Wahid Wafi, *Al-Munjid Fi al-Lughah*, (Bairut: Dar al-Masyrik, 1987), hlm 384

¹⁵Asmuni, *Aplikasi Musyarakah Dalam Perbankan Islam*, Jurnal Hukum Islam Al-Mawarid, Edisi XI, 2004, hlm 160

¹⁶Fatwa DSN No.08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah

Pembiayaan multijasa adalah pembiayaan yang diberikan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) kepada nasabah dalam manfaat atas suatu jasa.¹⁷ Pembiayaan multijasa juga dapat diartikan sebagai penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berupa transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan (*ujrah*), tanpa imbalan atau bagi hasil.¹⁸

Dalam penerapannya, pembiayaan multijasa menggunakan akad *ijarah* dan *al-ijarah al-Muntahia bit-Tamlik* (IMB). Menurut fatwa DSN-MUI Nomor 09/DSN-MUI/VI/2000 Tentang Pembiayaan *Ijarah*, yaitu akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujrah*), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.

Sedangkan dan *al-ijarah al-Muntahia bit-Tamlik* (IMB) yaitu sejenis perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang di tangan si penyewa.¹⁹ *Al-Ijarah al-Muntahia bit-Tamlik* dapat diartikan sebagai akad pemindahan hak guna atau manfaat suatu barang dengan diikuti pemindahan hak kepemilikan barang yang disewa setelah berakhirnya masa sewa.

Pelaku bisnis dalam menjalankan usahanya tentu membutuhkan sumber modal. Jika pelaku tidak memiliki sumber modal secara cukup, maka salah satu

¹⁷Fatwa DSN No.44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Pembiayaan Multijasa.

¹⁸Kodifikasi produk perbankan syariah yang dikeluarkan oleh Direktorat Bank Indonesia pada tahun 2008

¹⁹Muhammad Syafii Antonio, *op.cit.*, hlm 118.

pilihan untuk mendapatkan suntikan dana ialah dengan melakukan pembiayaan kepada bank.²⁰

Menurut PSAK No.23 paragraf 06 Ikatan Akuntan Indonesia menyatakan bahwa pendapatan adalah arus kas masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal perusahaan selama satu periode bila arus kas masuk tersebut mengakibatkan kenaikan ekuitas, yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal.

Dalam PSAK 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah, pada paragraf 162 dijelaskan kelompok pendapatan bank syariah secara garis besar terdiri dari pendapatan operasi utama dan pendapatan operasi lainnya. Pendapatan operasi ini terdiri dari pembiayaan yang dilakukan bank syariah sedangkan pendapatan operasi lainnya di peroleh bank dari kegiatan lainnya.

Pendapatan operasional dari penyaluran dana bank syariah pada dasarnya diperoleh dari dari penyediaan jasa kredit atau pembiayaan kepada nasabah, pendapatan atau jasa pinjaman pembiayaan ini berupa bagi hasil, provosi serta komisi.

Untuk lebih jelasnya lagi penulis akan mengambil data jumlah perkembangan laporan keuangan yang diambil dari *annual report* pada PT. BPRS Al Masoem periode 2014-2016, mengenai *Pembiayaan Musyarakah* dan *Pembiayaan Ijarah* Multijasa terhadap Pendapatan Operasional. Datanya disajikan dalam bentuk tabel di bawah ini sebagai berikut:

²⁰Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta: UMP AMP YKPN, 2005), hlm 17.

Tabel 1.1
Laporan Keuangan Pembiayaan *Musyarakah*, Pembiayaan *Ijarah* Multijasa dan Pendapatan Operasional dari Penyaluran Dana di PT. BPRS Al Ma'soem Bandung Periode 2014 - 2016
(Dalam Ribuan Rupiah)

Periode		Pembiayaan <i>Musyarakah</i>		Pembiayaan <i>Ijarah</i> Multijasa		Pendapatan Operasional dari Penyaluran Dana	
2014	I	6,153,673		911,874		3,943,811	
	II	5,049,339	↓	1,258,865	↑	8,034,231	↑
	III	4,435,535	↓	3,539,305	↑	12,240,967	↑
	IV	4,094,750	↓	5,689,521	↑	17,025,053	↑
2015	I	2,701,875	↓	8,426,188	↑	4,851,220	↓
	II	3,491,146	↑	10,454,608	↑	9,860,018	↑
	III	7,039,375	↑	11,694,394	↑	14,897,600	↑
	IV	6,183,250	↓	11,821,178	↑	20,394,101	↑
2016	I	13,077,682	↑	10,490,152	↓	5,864,948	↓
	II	15,069,395	↑	8,848,299	↓	12,541,539	↑
	III	15,453,533	↑	7,985,504	↓	19,310,122	↑
	IV	14,255,810	↓	7,030,303	↓	26,326,514	↑

Sumber : www.bi.go.id data diolah: 2017

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah pendapatan operasional dari penyaluran dana bukan hanya hasil dari penjumlahan dari pembiayaan *musyarakah* dan pembiayaan *ijarah* multijasa, melainkan dari berbagai pos pembiayaan lainnya yang tidak penulis teliti. Berdasarkan data laporan keuangan di diatas, PT. BPRS Al Masoem periode 2014-2016 mengalami banyak perubahan.

Bisa dilihat pada triwulan II tahun 2014 posisi Pembiayaan *Musyarakah* mengalami penurunan, dari Rp. 6,153,673,- menjadi Rp. 5,049,339,-, sedangkan Pembiayaan *Ijarah* Multijasa mengalami kenaikan dari Rp. 911,874,- menjadi Rp. 1,258,865,-. Tetapi Pendapatan Operasional dari Penyaluran Dana mengalami kenaikan dari Rp. 3,943,811,- menjadi Rp. 8,034,231,-.

Pada triwulan III tahun 2014 posisi Pembiayaan *Musyarakah* mengalami penurunan, dari Rp. 5,049,339,- menjadi Rp. 4,435,535,-, sedangkan Pembiayaan *Ijarah* Multijasa mengalami kenaikan dari Rp. 1,258,865,- menjadi Rp. 3,539,305,-. Tetapi Pendapatan Operasional dari Penyaluran Dana mengalami kenaikan dari Rp. 8,034,231,- menjadi Rp. 12,240,967,-

Pada triwulan IV tahun 2014 posisi Pembiayaan *Musyarakah* mengalami penurunan, dari Rp. 4,435,535,- menjadi Rp. 4,094,750,-, sedangkan Pembiayaan *Ijarah* Multijasa mengalami kenaikan dari Rp. 3,539,305,- menjadi Rp. 5,689,521,-. Tetapi Pendapatan Operasional dari Penyaluran Dana mengalami kenaikan dari Rp. 12,240,967,- menjadi Rp. 17,025,053,-

Pada triwulan I tahun 2015 posisi Pembiayaan *Musyarakah* mengalami penurunan dari Rp. 4,094,750,- menjadi Rp. 2,701,875,-. Sedangkan Pembiayaan *Ijarah* Multijasa mengalami kenaikan dari Rp. 5,689,521,- menjadi Rp. 8,426,188,-. Tetapi Pendapatan Operasional dari Penyaluran Dana mengalami penurunan dari Rp. 17,025,053,- menjadi Rp. 4,851,220,-.

Pada triwulan IV tahun 2015 Pembiayaan *Musyarakah* mengalami penurunan dari Rp. 7,039,375,- menjadi Rp. 6,183,250,-. Sedangkan Pembiayaan *Ijarah* Multijasa mengalami kenaikan dari Rp. 11,694,394,- menjadi Rp. 11,821,178,- tetapi Pendapatan Operasional dari Penyaluran Dana mengalami kenaikan dari Rp. 14,897,600,- menjadi Rp. 20,394,101,-.

Pada triwulan I tahun 2016, Pembiayaan *Musyarakah* mengalami kenaikan dari Rp. 6,183,250,- menjadi Rp. 13,077,682,-. Sedangkan Pembiayaan *Ijarah* Multijasa mengalami penurunan dari angka Rp. 11,821,178,- menjadi Rp. 10,490,152,-, tetapi Pendapatan Operasional dari Penyaluran Dana mengalami penurunan dari Rp. 20,394,101,- menjadi Rp. 5,864,948,-.

Pada triwulan II tahun 2016 Pembiayaan *Musyarakah* mengalami kenaikan dari Rp. 13,077,682,- menjadi Rp. 15,069,395,-. Pembiayaan *Ijarah* Multijasa mengalami penurunan angka dari Rp. 10,490,152,- menjadi Rp. 8,848,299,-. Tetapi Pendapatan Operasional dari Penyaluran Dana mengalami kenaikan angka dari Rp. 5,864,948,- menjadi Rp. 12,541,539,-.

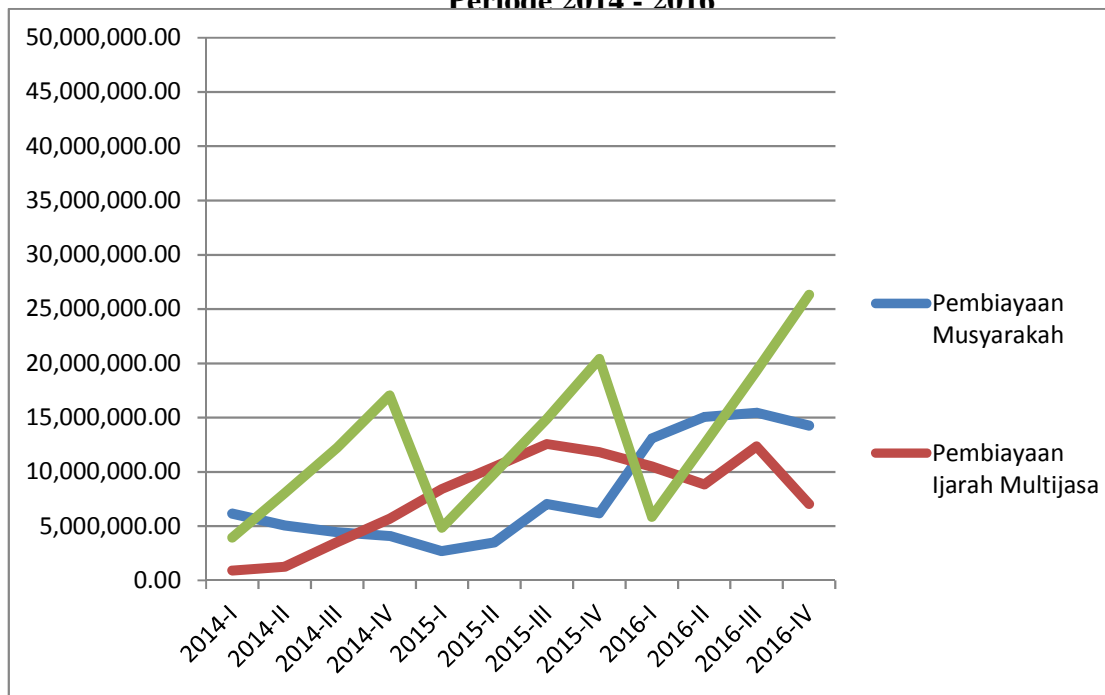
Pada triwulan III tahun 2016 Pembiayaan *Musyarakah* mengalami kenaikan dari Rp. 15,069,395,- menjadi Rp. 15,453,533,-. Kemudian Pembiayaan *Ijarah* Multijasa mengalami penurunan dari Rp. 8,848,299,- menjadi Rp. 7,985,504,-. Sedangkan Pendapatan Operasional dari Penyaluran Dana mengalami kenaikan angka dari Rp. 12,541,539,- menjadi Rp. 19,310,122,-.

Pada triwulan IV tahun 2016 Pembiayaan *Musyarakah* mengalami penurunan dari angka Rp. 15,453,533,- menjadi Rp. 14,255,810,-. Pembiayaan *Ijarah* Multijasa juga mengalami penurunan dari angka Rp. 7,985,504,- menjadi Rp. 7,030,303,-. Tetapi Pendapatan Operasional dari Penyaluran Dana mengalami kenaikan dari angka Rp. 19,310,122,- menjadi Rp. 26,326,514,-.

Menurut Lukman Denda Wijaya, “Implikasi bagi Bank sebagai akibat dari timbulnya kredit bermasalah, diantaranya akan mengakibatkan hilangnya kesempatan memperoleh laba dan berpengaruh bagi profitabilitas bank”.²¹ Dari pernyataan tersebut dapat dijelaskan bahwa, jika jumlah penyaluran pembiayaan mengalami kenaikan maka tingkat Pendapatan Operasional dari Penyaluran Dana akan mengalami kenaikan. Sedangkan jika jumlah pembiayaan mengalami penurunan, maka akan mengakibatkan tingkat Pendapatan Operasional dari Penyaluran Dana ikut mengalami penurunan.

²¹ Lukman Denda Wijaya, *Manajemen Perbankan* (Jakarta: Pustaka Setia, 2000), hlm 88.

Grafik 1.1
Laporan Keuangan
Pembiayaan *Musyarakah*, Pembiayaan *Ijarah* Multijasa dan Pendapatan
Operasional dari Penyaluran Dana di PT. BPRS Al Masoem
Periode 2014 - 2016



Data diatas menunjukkan bahwa pergerakan Pembiayaan *Musyarakah*, Pembiayaan *Ijarah* Multijasa dan Pendapatan Operasional dari Penyaluran Dana mengalami perubahan fluktuatif dan terdapat ketidak sesuaian antara data dan teori, dimana seharusnya apabila Pembiayaan *Musyarakah* dan Pembiayaan *Ijarah* Multijasa naik maka Pendapatan Operasional dari Penyaluran Dana ikut mengalami kenaikan.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul ***Pengaruh Pembiayaan Musyarakah dan Pembiayaan Ijarah Multijasa Terhadap Pendapatan Operasional dari Penyaluran Dana Di PT. BPRS Al Masoem Periode 2014-2016.***

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan masalah yang akan di angkat dalam skripsi ini, yaitu sebagai berikut :

1. Seberapa besar pengaruh Pembiayaan *Musyarakah* terhadap Pendapatan Operasional dari Penyaluran Dana secara parsial di PT. BPRS Al Masoem periode 2014-2016?
2. Seberapa besar pengaruh Pembiayaan *Ijarah* Multijasa terhadap Pendapatan Operasional dari Penyaluran Dana secara parsial di PT. BPRS Al Masoem periode 2014-2016?
3. Seberapa besar pengaruh Pembiayaan *Musyarakah* dan Pembiayaan *Ijarah* Multijasa terhadap Pendapatan Operasional dari Penyaluran Dana secara simultan di PT. BPRS Al Masoem periode 2014-2016?

C. Tujuan Penelitian

Dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menjelaskan dan menganalisis pengaruh Pembiayaan *Musyarakah* terhadap Pendapatan Operasional dari Penyaluran Dana secara parsial di PT. BPRS Al Masoem periode 2014-2016;
2. Menjelaskan dan menganalisis pengaruh Pembiayaan *Ijarah* Multijasa terhadap Pendapatan Operasional dari Penyaluran Dana secara parsial di PT. BPRS Al Masoem periode 2014-2016;
3. Menjelaskan dan menganalisis pengaruh Pembiayaan *Musyarakah* dan Pembiayaan *Ijarah* Multijasa terhadap Pendapatan Operasional dari Penyaluran Dana secara simultan di PT. BPRS Al Masoem periode 2014-2016.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan, diantaranya :

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini menjadi sumbangan bagi akademik sehingga dapat berguna bagi pengembangan ilmu serta menjadi referensi tambahan bagi penelitian-penelitian selanjutnya khususnya dalam ruang lingkup manajemen keuangan syariah.

2. Kegunaan Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi masukan bagi dunia Perbankan Syariah khususnya PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al Masoem dalam usahanya untuk meningkatkan kinerja keuangan terutama dalam peningkatan pembiayaan *musyarakah*, pembiayaan *ijarah* multijasa agar dapat meningkatkan pendapatan operasional dari penyaluran dana.